

**KONTRIBUSI INDUSTRI JASA DAN
PERDAGANGAN JASA LINTAS BATAS BAGI
RUMUSAN STRATEGI BARU PERTUMBUHAN
EKONOMI**

(Catatan hasil pertemuan APEC SOM 1 &
Related Meetings, Maret 2011,
di Washington D.C., AS)
(Sigit Setiawan)

Kesadaran akan ketidakseimbangan yang terjadi pada proses pembangunan yang telah dilalui telah menjadi stimulus perubahan paradigma para pemimpin dunia tentang bagaimana pembangunan yang ideal semestinya diarahkan. Bersama-sama forum utama dunia lainnya, para pemimpin ekonomi dunia di forum APEC berkeinginan berada di barisan terdepan menjadi motor perubahan paradigma tersebut. Dengan menggenggam 54% PDB, 44% perdagangan, dan 40% populasi dunia, 21 ekonomi utama kawasan Asia Pasifik yang tergabung dalam forum APEC berupaya merumuskan strategi pembangunan di kawasan Asia Pasifik ke arah pembangunan yang seimbang dan berkualitas. Seimbang dan berkualitas yang dimaksud adalah pembangunan inovatif kreatif yang dapat memacu penciptaan lapangan kerja baru, yang dapat mendistribusikan 'kue' hasil pembangunan ke semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali, dengan tetap mempertahankan kelestarian dan keberlangsungan lingkungan hidup sebagai warisan bagi generasi mendatang.

Agenda pertemuan APEC 2011 di Amerika Serikat tidak lain merupakan kelanjutan dari pertemuan APEC 2010 di Jepang. Tema pokok "*new strategy for jobs and growth*" yang diusung Amerika Serikat selaku tuan rumah APEC 2011 merupakan kesinambungan dari strategi baru pertumbuhan ekonomi yang telah disepakati dan akan didorong bersama oleh para ekonomi APEC, sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi APEC *Leaders* tahun 2010 di Yokohama, Jepang. Dalam deklarasi para kepala negara atau pimpinan ekonomi anggota APEC tersebut, telah dirumuskan strategi baru pertumbuhan ekonomi yang meliputi : (1) *green or sustainable growth*; (2)

inclusive growth; and (3) *knowledge-based growth*.

Upaya mendorong kontribusi sektoral dalam rumusan strategi pertumbuhan baru tersebut di atas menjadi isu krusial dalam berbagai pertemuan *working group* dan seminar pertemuan SOM 1 APEC 2011 yang diselenggarakan di Washington D.C., Amerika Serikat dari tanggal 27 Februari - 12 Maret 2011. *Group on Services* (GOS) termasuk dalam *working group* yang mendiskusikan bagaimana industri jasa dan perdagangan jasa lintas batas dapat berkontribusi dalam rumusan strategi baru pertumbuhan ekonomi. Tidak berhenti sampai di situ, GOS juga mengadakan seminar khusus dengan tema "Kontribusi Industri Jasa dan Perdagangan Jasa Lintas Batas bagi Rumusan Strategi Baru Pertumbuhan Ekonomi" selama 2 hari pada tanggal 16 – 17 September 2010 di Sendai Jepang. Strategi baru pertumbuhan ekonomi pada seminar dimaksud lebih difokuskan pada strategi pertumbuhan inklusif dan strategi pertumbuhan 'hijau' atau berkelanjutan (*sustainable*). Hasil perumusan implikasi kebijakan yang dihasilkan pada seminar tersebut selanjutnya disampaikan pada pertemuan GOS pada tanggal 3 Maret 2011, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari rangkaian APEC SOM 1 & *Related Meetings* 2011 dari tanggal 27 Februari hingga 12 Maret 2011.

Strategi baru pertumbuhan ekonomi akan memperbaiki arah strategi pembangunan yang selama ini hanya mementingkan pertumbuhan bersifat fisik semata, namun tidak mengindahkan faktor keseimbangan dengan unsur sosial dan lingkungan hidup. Pembangunan dapat dikatakan inklusif, bila seluruh unsur masyarakat dapat turut serta memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi secara berkeadilan. Dengan strategi pertumbuhan inklusif, kebijakan yang dirumuskan pemerintah mesti dapat menciptakan sinergi antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial (*social equity*). Dari perspektif strategi pertumbuhan 'hijau', pemerintah mesti dapat mencari titik keseimbangan kebijakan yang dapat menciptakan harmoni antara pertumbuhan

ekonomi dan keberlangsungan serta kelestarian lingkungan hidup, yang penting bagi generasi kini dan generasi mendatang.

Sektor jasa dan perdagangan jasa dapat menjadi cara yang ampuh dalam mendorong kedua strategi pertumbuhan tersebut, mengingat secara rata-rata sektor jasa memberikan kontribusi lebih dari 50% PDB keseluruhan ekonomi anggota APEC dengan trend pertumbuhan yang terus menanjak. Namun di sisi lain, keterbukaan melalui liberalisasi perdagangan sektor jasa tidak serta merta dapat membentuk tatanan masyarakat yang secara sosial lebih inklusif dan sadar akan pentingnya keberlangsungan dan kelestarian lingkungan hidup. Di sinilah arti peran penting keberadaan regulasi yang memadai yang diterbitkan pemerintah, guna menyelaraskan liberalisasi jasa agar tidak timpang dan hanya mendorong pertumbuhan ekonomi semata namun juga mendorong pembangunan sosial dan keberlangsungan lingkungan hidup.

Dari sisi pembangunan sosial, melalui sektor jasa, pembangunan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan akses dan keterlibatan elemen masyarakat lain yang sebelumnya 'terpinggirkan' untuk turut¹ menikmati peningkatan kesejahteraan. Terhadap kaum wanita yang seringkali mendapatkan kesulitan mengakses lapangan kerja, tumbuhnya sektor jasa dapat melahirkan harapan akan terciptanya beragam peluang baru. Dibandingkan sektor manufaktur, sektor jasa merupakan sektor yang relatif lebih 'ramah' terhadap wanita, mengingat sifat pekerjaan di sektor jasa yang memiliki lebih banyak interaksi dengan konsumen dan lebih berorientasi pada pelayanan. Sektor jasa pun lebih bersifat padat karya. Mencermati trend yang berkembang di negara maju, sektor manufaktur cenderung mengarah ke industri padat modal, sehingga ke depan dibutuhkan lebih sedikit keterlibatan banyak tenaga kerja termasuk pekerja wanita. Berdasarkan hal ini diharapkan tumbuhnya sektor jasa dapat

diarahkan untuk menciptakan lebih banyak pekerjaan, khususnya bagi wanita.

Diyakini akses terhadap sektor jasa dapat menjadi motor kesetaraan kesempatan yang merupakan inti dari pembangunan inklusif. Dengan tumbuhnya perdagangan sektor jasa, akan tumbuh dan bertambah luas pula akses golongan miskin dan kurang beruntung terhadap sektor jasa utama. Menurut Jaana Remes, *Senior Fellow* – McKinsey Global Institute (2011)², sektor jasa menyumbang lebih dari dua pertiga pertambahan kesempatan kerja di negara dan ekonomi dengan pendapatan menengah ke bawah. Sedangkan di negara maju, seiring berkurangnya kesempatan kerja di sektor manufaktur yang mengarah ke padat modal, sektor jasa berkontribusi terhadap penciptaan kesempatan kerja lebih dari 100%. Dengan makin efisiennya sektor jasa, barang-barang hasil produksi akan lebih mudah dan murah dijangkau oleh segala lapisan termasuk kaum miskin dan kurang beruntung.³ Beberapa sektor jasa penting seperti pendidikan dan kesehatan tercatat memberikan kontribusi yang signifikan atas pertumbuhan inklusif, antara lain berkat pertumbuhan kesempatan kerja bagi tenaga pendidik dan tenaga medis yang didominasi kaum wanita.

Terkait hubungan antara tingkat pendapatan suatu negara dan nilai tambah sektor jasa, Juzhong Zhuang (ADB, 2011)⁴ mengatakan bahwa makin tinggi tingkat pendapatan per kapita suatu negara, makin penting kontribusi sektor jasa dalam perekonomian negara tersebut melalui penciptaan lapangan kerja. Namun dalam kasus perekonomian negara berkembang, ia mendapati fakta kurang optimalnya kontribusi sektor jasa terhadap pertumbuhan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja, sehingga tidak sejalan dengan strategi pertumbuhan inklusif. Untuk mengatasi hal tersebut, ia menyarankan pemerintah dapat menjalankan kebijakan sebagai berikut :

² APEC Group on Services, 2011

³ Gloria Pasadilla, "Trade in Services and Human Development: A First Look at the Links", dalam APEC Group on Services, 2011.

⁴ APEC Group on Services, 2011

¹ Juzhong Zhuang, "Inclusive Growth and the Service Sector: Conceptual Issues and Policy Implications", dalam APEC Group on Services, 2011.

- Melakukan lebih banyak lagi investasi di infrastruktur transportasi dan belanja publik di sektor jasa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan;
- Meningkatkan liberalisasi di sektor jasa yang berhubungan erat dengan pembangunan inklusif yakni jasa keuangan, telekomunikasi, kesehatan, pendidikan, dan ritel;
- Regulasi yang lebih baik dalam mengatur pasar agar dapat mendorong kompetisi yang sehat, terjaminnya kualitas jasa, dan terlindungnya konsumen;
- Reformasi perpajakan untuk menciptakan kesetaraan bagi para pelaku usaha;
- Kebijakan pemerintah terhadap industri untuk mengatasi kegagalan pasar dan mendorong inovasi;
- Penguatan kelembagaan dan *capacity building*;
- Peningkatan kesetaraan dan perluasan akses ke sektor jasa.

Dari perspektif pembangunan 'hijau', sektor jasa dikategorikan sebagai sektor industri yang cenderung mengkonsumsi energi lebih sedikit dibandingkan sektor manufaktur (Jaana Remes, 2011), sedangkan MoonJoong Tcha (2011) menyebut industri sektor jasa sebagai industri 'hijau'. Namun di balik itu, pertumbuhan sektor jasa yang makin cepat harus diwaspadai karena di masa depan industri jasalah yang berpotensi sebagai faktor utama penyebab peningkatan permintaan energi. Dalam kaitannya dengan sektor jasa konstruksi misalnya, pesatnya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan kesejahteraan. Kesejahteraan yang meningkat akan melahirkan permintaan atas pembangunan properti dan perumahan yang lebih luas, serta bertambahnya keragaman jenis perabot listrik inovatif yang menyedot energi yang lebih besar. Jadi, kecenderungan yang ada memperlihatkan bahwa total konsumsi energi justru cenderung meningkat seiring dengan pertumbuhan PDB per kapita (Jaana Remes, 2011).

Mengantisipasi hal tersebut, efisiensi energi sektor jasa menjadi faktor penting yang mesti diperhatikan dalam perspektif pembangunan

'hijau'. Efisiensi aktivitas energi sektor jasa masih belum optimal. Hasil riset McKinsey menyatakan bahwa terdapat potensi pengurangan konsumsi energi di sektor jasa paling sedikit sebesar 10%. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengadopsi penggunaan solusi efisiensi energi dari perangkat perlengkapan elektronik yang digunakan oleh industri di sektor jasa. Investasi awal yang ditanamkan perusahaan atas penggunaan solusi efisiensi energi tersebut akan tergantikan oleh manfaat ekonomis dari penghematan konsumsi energi yang terjadi. Peluang solusi dimaksud dapat berasal dari pengisolasian yang lebih baik, solusi pendinginan dan pemanasan yang lebih efisien hingga penggunaan perlengkapan kantor, keluarga dan pribadi yang lebih hemat energi.

Pembangunan 'hijau' juga lekat dengan persoalan mitigasi perubahan iklim saat ini. Upaya mitigasi perubahan iklim memiliki kedekatan dan merupakan bagian dari strategi pembangunan 'hijau' negara-negara di dunia, mengingat besarnya dampak kerugian yang harus ditanggung generasi kini dan mendatang. Berbeda dengan sektor jasa lainnya yang memiliki *genuine demand*, permintaan jasa lingkungan terkait solusi mitigasi perubahan iklim diyakini bersumber dari dorongan regulasi pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut, dalam mendorong perdagangan melalui liberalisasi dibutuhkan kerangka regulasi yang efektif agar upaya memacu pertumbuhan ekonomi tetap tidak meninggalkan keberpihakan terhadap kelestarian dan keberlangsungan lingkungan hidup, yang merupakan aset berharga untuk diwariskan bagi generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

APEC Group on Services, 2011. *Final Report on Workshop for Capacity Building on the Role of Cross-Border Services Trade in New Growth Strategies*. Washington, D.C., 2011.

---oOo---